

1. Islam dan Kristen

Pada dasawarsa terakhir abad ke-19 pada parlemen Negara Belanda terjadi persaingan yang sengit antara partai agama dan partai nonagama. Persaingan ini terkait seberapa banyak masing-masing partai mampu memperoleh suara dalam pemilihan sebagai partai penguasa. Di mana pada masa ini partai nonagamalah yang memperoleh kemenangan dalam parlemen Belanda. Namun, pada peralihan abad ke-20 kemenangan beralih ke tangan partai agama yang berlanjut hingga tahun-tahun selanjutnya yakni pada tahun 1905, 1913 hingga selesainya Perang Dunia Kedua. Dengan demikian tampuk kekuasaan yang selama lima puluh tahun dipegang oleh partai nonagama yang Liberal berhasil diambil alih oleh partai agama yang mengakibatkan golongan agama semakin kuat dan membawa pemerintahan Belanda ke prinsip Kristen.

Dengan berkuasanya kembali partai agama, maka semangat *zending* mulai digalakkan lebih giat lagi. Hingga pada tahun 1909 Gubernur Jenderal Idenburg yang berkuasa sampai tahun 1916, menyatakan bahwa “Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia”. Sejak tahun 1909 inilah berbagai organisasi Kristen sangat cepat meningkatkan kegiatannya di Indonesia, hal ini tidak lain karena dukungan penuh yang diberikan pemerintah Belanda kepada para missionaris. Sampai pada awal abad ke-20, dukungan pemerintah Belanda terhadap kristenisasi masih terus dilancarkan. Namun, kristenisasi yang dilakukan terbatas pada

daerah yang nilai Islamnya lemah. Sedangkan bagi daerah yang nilai Islamnya kuat seperti daerah Aceh misalnya, penasehat pemerintah Belanda seperti Snouck Hurgronje tidak merestui dilancarkannya kristenisasi. Karena bagi Snouck, untuk menghadapi Islam yang kuat maka diperlukan cara yang halus, yaitu dengan menyalurkan semangat orang Islam kearah yang menjauhi agama Islam melalui asosiasi kebudayaan.

Bahkan menurut R. A. Kern, agama Islam harus dihadapi dengan cara membawa pemeluknya ke tingkat yang lebih tinggi, karena menurutnya semua peraturan Islam dinilainya merupakan tangan paling besar bagi kemajuan. Namun, kemajuan yang diharapkan dapat mengalihkan pandangan orang Islam agar lalai dari ajaran Islam yang dianutnya, nampaknya justru membawa masyarakat Indonesia ke dalam kemajuan, karena ternyata dalam banyak hal ajaran agama Islam mengakibatkan perubahan dan modernisasi, sehingga pemerintah Belanda berjuang untuk membatasi pengaruh Islam itu dengan mendukung kepala adat dan menggalakkan rasa kedaerahan. Tetapi di luar dugaan pemerintah Belanda, dengan digalakkannya rasa kedaerahan justru membantu penyebaran agama Islam dan pengaruhnya di seluruh Indonesia. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan kristenisasi ini yaitu kebangkitan Islam. Di mana ulama-ulama daerah yang sebelumnya merasa tenang dengan ibadahnya tanpa merasa ada ancaman, menjadi terganggu dan mengadakan reaksi yang hebat.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa persaingan antara pemerintah Belanda, Kristen dan Islam bukanlah persaingan segitiga melainkan persaingan yang bersifat dua lawan satu, yakni di mana pemerintah Belanda berkoalisi dengan Kristen untuk menghadapi Islam. Karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka penguasaan masalah Islam adalah kunci pemecahan bagi terciptanya kelanggengan kolonialisasi. Oleh karena itu, diakui bahwa “kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan dan *zending* Kristen merupakan rekan seperkutuan bagi pemerintah kolonial”. Sehingga pemerintah Belanda akan membantu semua masalah yang dihadapi dalam kegiatan perluasan *zending*.

2. Netral Teori dan Praktik

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap netral terhadap agama ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1885 yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan beragama dan menyatakan netral dalam masalah agama, kecuali bila aktivitas agama tersebut dinilai mengganggu ketertiban keamanan. Jika sepintas dipahami makna netral terhadap agama tersebut, pastinya yang terbesit yakni keengganan pemerintah Belanda untuk tidak memihak dan tidak ikut campur tangan sama sekali terhadap semua agama yang ada di Indonesia kala itu. Namun kenyataan yang didapatkan tidak sesuai isi teks undang-undang yang digambarkan. Pemerintah Belanda memiliki sikap yang cenderung tidak

konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana berikut ini:

- a. Terhadap masyarakat animis, pemerintah Belanda melarang kebiasaan-kebiasaan tertentu mereka, misalnya: menjadikan manusia sebagai kurban pemujaan, perang balas dendam, potong kepala, dan sebagainya.
- b. Terhadap masyarakat Hindu, pemerintah Belanda melarang kebiasaan yang mewajibkan seorang janda membakar diri ketika suaminya meninggal.
- c. Terhadap Islam, pemerintah Belanda tidak berkenan ikut campur dalam urusan pembangunan masjid, tetapi bersikap sangat waspada dan penuh curiga terhadap para haji, sehingga pada tahun 1859 pemerintah Belanda mengeluarkan suatu ordonansi yang mengatur masalah ibadah haji lebih ketat dari sebelumnya.
- d. Sedangkan terhadap Kristen, pemerintah Belanda bersikap sangat peduli terutama dalam hal pemberian bantuan bagi kegiatan keagamaan Kristen yang seringkali sangat tidak adil antara agama yang lainnya. Misalnya bantuan untuk Kristen berjumlah f. 1.666.300,-; sedangkan untuk Islam hanya berjumlah f. 3.950,-;

Berdasarkan kenyataan di atas, kebijakan netral terhadap agama yang dikeluarkan pemerintah Belanda ini, secara teori dan praktik tidak ada

Barat, karena sangat berpotensi membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa Islam yang dikuasainya.

Rasa khawatir ini juga dirasakan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia. Bagaimana tidak, meskipun letak kepulauan Indonesia berada jauh dari Turki, namun kenyataan terjalinnya hubungan baik antara keduanya ini tidak dipungkiri berjalan baik. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda merasa khawatir jika ide Pan Islam akan mempengaruhi kestabilan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Belanda bersikap demikian ini, sebab mereka tidak lupa pada kenyataan masa lalu yaitu ketika terjadi perlawanan Aceh kepada Portugis di Malaka dengan perang sabilnya yang terjadi pada abad ke-16, ketika itu Aceh memiliki perwakilan di Istanbul, sehingga dalam menghadapi penjajah Aceh memperoleh bantuan Senjata Api dari Turki. Perang ini merupakan perang yang paling akhir, paling pahit dan paling lama. Sebab hingga menjelang abad ke-20 segala usaha dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun masih belum bisa terselesaikan.

Melihat kenyataan inilah, Belanda mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi pengaruh Pan Islam terhadap daerah-daerah kekuasaannya yang lain, agar tidak muncul lagi kejadian seperti yang terjadi di Aceh. Oleh karenanya, berbagai bentuk pengawasan dilakukan salah satunya yakni pengawasan terhadap para haji dan orang-orang Indonesia yang bermukim di Makkah.